

**IMPLEMENTASI PROGRAM WIRAUSAHA BARU OLEH DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENDUKUNG
GERDU KEMPLING KOTA SEMARANG TAHUN 2014**

Oleh :

Yuni Kurniasih, R. Slamet Santoso, Dyah Lituhayu

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Government of Semarang through Local Regulation Number 4 of 2008 about poverty reduction in Semarang City which is an acceleration in poverty reduction efforts. The strategy called Gerdu Kempling (Integrated Health, Economy, Education, Infrastructure, and Environment) and one of the program that is New Entrepreneur Program by Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.

This research was meant to find out how the implementation of New Entrepreneur Program by Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi that supports Gerdu Kempling Kota Semarang in 2014 and knowing the influence factors of this implementation. New Entrepreneur Program has been part of Gerdu Kempling starting in 2011. There are three locations in this research: Village of Bulusan, Ngadirgo and Padangsari. This research using qualitative descriptive research methods. The subject in this study consisted of eight (8) informants.

The results showed that the implementation of New Entrepreneur Program are still less effective that is seen from the precision implementation aspects. The factors that influence the implementation such as the goals and basic of policy, resource policy, communication and implementation activities, the implementing agency characteristics, external conditions as well as the disposition of the implementor are still less optimal too. Based on these conclusions, the researcher recommend to the implementation agency and target of this program need high commitment and take maximal advantages for sustainable in order to achieve the purpose of this program.

Keywords : Gerdu Kempling, New Entrepreneur Program, Implementation

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pada dasarnya kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional dan berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan, dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor dan antar golongan penduduk.

Pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 401.442 jiwa, dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi sebesar 448.398 jiwa. Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/716/2013 tercatat warga miskin (gakin) di Kota Semarang pada tahun 2013 berjumlah 373.978 jiwa. Masih tingginya angka kemiskinan juga dibarengi dengan tingginya jumlah angkatan kerja di Kota Semarang yaitu sekitar 26%.

Melihat pada prioritas pembangunan Kota Semarang yang

pertama dalam *sapta program* yaitu penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, untuk itu diperlukan pengembangan strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang tepat program, tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan profil, kebutuhan, karakteristik, dan potensi warga miskin melalui Gerdu Kempling. Program yang dilakukan secara bertahap ini, yaitu dua kali dalam satu tahun dan pelaksanaannya pada tingkat kelurahan diharapkan pada tahun 2015 angka kemiskinan turun 10%.

Salah satu program yang terdapat dalam Gerdu Kempling adalah Program Wirausaha Baru yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Kota Semarang. Masuknya Program Wirausaha Baru ke dalam Program Gerdu Kempling ini dimulai pada tahun 2011 dimana pada tahun tersebut merupakan tahun pertama dari tahapan pelaksanaan Gerdu Kempling.

Adapun permasalahan pada Program Wirausaha Baru yang telah berjalan selama ini yaitu terbatasnya anggaran yang dimiliki, masih terdapat keterlambatan penyampaian

informasi kepada kelurahan sasaran program, pola pendampingan tidak berkelanjutan, kesungguhan atau konsistensi masyarakat sebagai sasaran program masih belum baik. Agenda kegiatan yang dijalankan sering kali hanya terkesan aktif saat awal pelaksanaan saja. Selain itu, keterbatasan kemampuan yang dimiliki seperti beban kerja yang tinggi kurang diimbangi dengan tenaga kerja yang ada. Kurangnya monitoring dari pihak Disnakertrans Kota Semarang bisa dilihat pada beberapa kegiatan dalam program ini terkait dengan laporan evaluasi yang tidak berjalan dengan seharusnya diberikan per tiga bulan sekali.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk dilakukan suatu kajian tentang implementasi Program Wirausaha Baru dalam Gerdu Kempling Kota Semarang tahun 2014 dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang sebagai pelaksananya.

b. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Wirausaha Baru yang dilaksanakan oleh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mendukung Program Gerdu Kempling Kota Semarang pada tahun 2014.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Program Wirausaha Baru dalam mendukung Program Gerdu Kempling Kota Semarang tahun 2014.

c. Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut James A. Enderson dalam Subarsono (2009:2-3) yaitu sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan

dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertanahan, dan sebagainya.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar implementasi kebijakan yang efektif yang dikemukakan oleh Riant Nugroho yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja suatu implementasi kebijakan publik, yaitu standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana,

disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

d. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, Pegawai Kelurahan tempat pelaksanaan program, serta ketua kelompok sasaran penerima Program Wirausaha Baru tahun 2014.

Jenis data yang digunakan yaitu data yang berbentuk teks dan data yang berbentuk kata-kata. Adapun sumber data terdiri dari sumber data primer yang berasal dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen, buku, data statistik, laporan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasi data melalui reduksi data yakni data yang

diperoleh, dipilah sesuai dengan kebutuhan, kemudian data yang sudah dipilah, disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diberikan informan.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Wirausaha Baru oleh Disnakertrans Kota Semarang Tahun 2014.

1. Ketepatan Kebijakan

Program Wirausaha Baru melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan sarana usaha dinilai sudah dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran yaitu kurangnya keterampilan dan tertidaktersediaan modal usaha. Perencanaan telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu Seksi Perluasan Kerja dan Pemberdayaan Penganggur bersama dengan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Bagian Kesekretariatan Disnakertrans Kota Semarang. Program Wirausaha Baru juga bersinergis dengan Gerdu Kempling, dimana posisi Program Wirausaha Baru merupakan salah satu program

yang masuk dalam Gerdu Kempling Bidang Ekonomi.

2. Ketepatan Pelaksana

Pelaksanaan Program WUB telah dilakukan oleh agen pelaksana yang tepat. Melihat dari sifat dan tujuan dari Program Wirausaha Baru, maka sudah tepat apabila program ini dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta seperti Disnakertrans Kota Semarang, BP2TK Provinsi Jawa Tengah, dinas yang terkait sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, LPK tingkat Kota Semarang, rekanan pengadaan barang dan pihak kelurahan. Masing-masing agen pelaksana telah mempunyai tugas dan tanggung jawabnya seperti yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Wirausaha Baru Disnakertrans Kota Semarang.

3. Ketepatan Target

Para penerima kebijakan ini adalah pengangguran atau setengah menganggur dan termasuk dalam kriteria warga miskin Kota Semarang. Akan tetapi, kelompok sasaran yang ada di lapangan dinilai kurang sesuai seperti kriteria yang sudah ditetapkan karena sebagian

besar anggota kelompok sasaran memiliki pekerjaan tetap dan banyak diantaranya yang tidak termasuk dalam kriteria warga miskin Kota Semarang. Kelompok sasaran juga belum memiliki kesiapan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Banyak diantara anggota kelompok sasaran yang menjalankan usahanya hanya selama dua atau tiga bulan setelah dilaksanakannya program ini.

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan internal dalam pelaksanaan Program Wirausaha Baru ini adalah keterkaitan yang sudah terjalin dengan baik antara Disnakertrans Kota Semarang dengan pihak-pihak lain yang terlibat karena memang para agen pelaksana tersebut sudah mulai bekerja sama sejak tahun 2011. Namun, koordinasi pasca pelaksanaan program dinilai masih belum maksimal sehingga tidak adanya keberlanjutan program. Sedangkan lingkungan eksternal adalah adanya tanggapan positif dan dukungan dari kelompok sasaran yang ditunjukkan dengan keaktifan kelompok sasaran pada saat Program Wirausaha Baru ini dilaksanakan.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses dilihat dari adanya pemahaman pihak-pihak yang terlibat mengenai pentingnya Program WUB dan kesediaan Disnakertrans Kota Semarang dalam melaksanakan program ini. Namun dalam pelaksanaannya, proses implementasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik terutama kaitannya dengan keterlambatan pengajuan proposal oleh kelompok sasaran, proses komunikasi yang belum maksimal, tidak ada survei kelayakan pada kelompok sasaran sebelum diadakan pelatihan, tidak ada pendampingan dari Disnakertrans Kota Semarang dan tidak adanya laporan akhir tahun perkembangan kegiatan usaha dari kelompok sasaran program.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Wirausaha Baru Tahun 2014.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Para pelaksana dan kelompok sasaran telah memahami apa yang menjadi tujuan dari Program Wirausaha Baru yaitu untuk

menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri kelompok sasaran dengan harapan dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Program Wirausaha Baru tidak memiliki ukuran seberapa besar hasil yang harus didapatkan oleh kelompok sasaran sehingga kurang adanya motivasi bagi kelompok sasaran untuk dapat mengembangkan usahanya dengan lebih maksimal.

2. Sumber Daya Kebijakan

Dari segi kuantitas, sumber daya manusia yang ada di Disnakertrans Kota Semarang masih dirasa kurang mencukupi untuk melaksanakan program ini. Sama halnya dengan sumber daya finansial, dana yang tersedia belum bisa untuk memenuhi semua kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan sarana usaha yang diinginkan oleh masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana juga dinilai jumlahnya masih belum mencukupi kebutuhan kelompok sasaran. Demikian pula untuk kualitasnya yang masih kurang karena banyak alat yang rusak

padahal baru beberapa kali digunakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur birokrasi Seksi Perluasan Kerja dan Pemberdayaan Penganggur Disnakertrans Kota Semarang sudah dapat dikatakan ramping dan fleksibel. Masing-masing personel dibagi habis dalam struktur pelaksana Program Wirausaha Baru. Standar operasional prosedur Program Wirausaha Baru yang ada yaitu Petunjuk Pelaksanaan Program Wirausaha Baru masih dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program ini sehingga program ini dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat kendala pada koordinasi internal Disnakertrans Kota Semarang yaitu sering terlambatnya jadwal rapat koordinasi dan cara kepemimpinan dari kabid yang baru berdampak pada ketidakmerataan tugas yang diberikan dari pimpinan kepada staf.

4. Disposisi Pelaksana

Pemahaman para implementor mengenai pelaksanaan program ini sudah cukup baik. Implementor telah

memberikan tanggapan yang baik dan positif serta mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Tindakan yang dilakukan para pelaksana sejalan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di lapangan. Implementor dalam menjalankan tugas tersebut berusaha untuk selalu berpedoman pada aturan yang berlaku.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang dilakukan masih kurang maksimal. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai program ini telah diberikan, namun tidak berjalan optimal. Adanya beberapa hambatan dalam penyampaian informasi seperti jarak yang cukup jauh, waktu yang terbatas dan kemampuan kelompok sasaran menangkap informasi yang diberikan membuat ketidakjelasan dan ketidaklengkapan informasi. Kurang aktifnya pihak kelurahan juga diakibatkan karena kurang intensnya komunikasi antar pelaksana program ini. Penyampaian informasi dari pihak kelurahan kepada kelompok sasaran juga memerlukan waktu yang lama.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Program Wirausaha Baru cukup banyak dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Tidak adanya dukungan dana dari pihak luar selain dari APBD Kota Semarang membuat kegiatan-kegiatan yang ada dalam program ini menjadi terbatas. Pengaruh lingkungan sosial dari kelompok sasaran menunjukkan adanya pengaruh positif berupa dukungan dan antusiasme warga sekitar terhadap pelaksanaan program. Adanya dukungan elit politik Pemerintah Kota Semarang seperti kemudahan dalam pencairan anggaran dan pihak kelurahan sebagai pimpinan lokal dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan menjadikan Program Wirausaha Baru dapat berjalan dengan lebih lancar.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi Program WUB belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal dimana hasil dari kegiatan ini belum dapat mencapai

tujuan yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dari lima kriteria implementasi program ini, tiga diantaranya masih dinilai belum baik yaitu berdasarkan ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Sedangkan penilaian yang sudah baik ada dalam kriteria aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana.

Terdapat faktor pendorong dalam implementasi Program Wirausaha Baru yaitu tujuan dan standar kebijakan, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Faktor penghambatnya yaitu tujuan dan standar kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, dan komunikasi antar organisasi.

2. Rekomendasi

Rekomendasi disini berkaitan dengan belum optimalnya implementasi program maupun terkait dengan faktor penghambat implementasi Program WUB. Berikut rekomendasinya :

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak

yang terlibat terutama pihak kelurahan agar ikut berperan aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan dilaksanakannya pertemuan rutin secara berkala.

2. Peningkatan pengawasan terhadap kinerja Disnakertrans Kota Semarang dalam pelaksanaan Program Wirausaha Baru sebagai upaya untuk mendorong komitmen agen pelaksana dalam melaksanakan segala aturan dan proses yang ada.
3. Perlunya dibuat suatu aturan standar ketercapaian hasil yang harus dicapai oleh kelompok sasaran program dalam menjalankan usahanya sebagai salah satu upaya untuk mendorong komitmen kelompok sasaran penerima program.
4. Meningkatkan keikutsertaan pihak-pihak swasta melalui CSR, pihak perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), lembaga-lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok masyarakat.

5. Disnakertras Kota Semarang harus memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, diperlukan juga pendampingan dari Disnakertras Kota Semarang dalam proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak kelurahan kepada masyarakat untuk menciptakan kejelasan dan konsistensi informasi.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta : PT. Buku Kita

Sumber regulasi

Perda Kota Semarang No. 4 tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang

Petunjuk Pelaksanaan Program Wirausaha Baru Disnakertrans Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2012.

Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah

Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Subarsono, A.G. 2012. *Analisis*

Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Tachjan, 2006. *Implementasi*

Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI